

BAB I

A. DASAR HUKUM .

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi ;
2. Undang-undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagai mana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undamg-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4693)
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737)
5. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4697)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinsosnakertrans

B. GAMBARAN UMUM SKPD DINSOSNAKERTRANS

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). (Terlampir).
2. Tugas Pokok dan Fungsi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinsosnakertrans mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas- tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penanganan sosial, hubungan dan perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- b. penyusunan program kerja di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penanganan sosial, hubungan dan perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penanganan sosial, hubungan dan perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penanganan sosial, hubungan dan perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- e. koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penanganan sosial, hubungan dan perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penanganan sosial, hubungan dan perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, perizinan dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian.

- a. [Data](#) PNS Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Struktur dan Golongan.

No.	Struktur/Bag/Subag/ Subdin/Seksi	Golongan				Jmlah	Ket
		I	II	III	IV		
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1	
2	Sekretaris	-	-	-	1	1	
	- Subag. Umum	1	4	4	-	9	
	- Subag. Keuangan	-	1	3	-	4	
	- Subag. Perenc.& Pelap.	-	1	2	-	3	
3	Ka. Bidang HPTK	-	-	-	1	1	
	- Seksi Waslinaker	-	-	4	-	4	
	- Seksi Hubinsyaker	-	-	4	-	4	
4	Ka. Bidang PTKT	-	-	-	1	1	
	- Seksi Penampatan TK	-	-	6	-	6	
	- Seksi Pelatihan TK	-	-	3	-	3	
	- Seksi Transmigrasi	-	-	2	-	2	
5	Ka. Bidang Sosial	-	-	-	1	1	
	- Seksi Rehabilitasi Sosial	-	1	3	-	4	
	- Seksi Asistensi Sosial	-	2	2	-	4	
	JUMLAH	1	9	33	5	48	

b. Data PNS Disosnakertrans Menurut Pendidikan

No.	Struktur/Bag/Subag/	Pendidikan						Jml
	Subdin/Seksi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1		1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
	- Subag. Umum	2	-	4	-	2	-	8
	- Subag. Keuangan	-	-		2	2	-	4
	- Subag. Perenc.& Pelap.	-	-	2	-	1	-	3
3	Ka. Bidang HPTK	-	-	-	-	1	-	1
	- Seksi Waslinaker	-	-		-	4	-	4
	- Seksi Hubinsyaker	-	-	1	-	3	-	4
4	Ka. Bidang PTKT	-	-	-	-	1	-	1
	- Seksi Penempatan TK	-	-	2	-	4	-	6
	- Seksi Pelatihan TK	-	-	2	-	1	-	3
	- Seksi Transmigrasi	-	-	2	-	1	-	3
5	Ka. Bidang Sosial	-	-	-	-	-	1	1
	- Seksi Rehabilitasi Sosial	-	-	3	-	1	-	4
	- Seksi Asistensi Sosial	-	1	2	1		-	4
	JUMLAH	2	1	18	3	23	1	48

4. Daftar Aset yang dikelola.

Terlampir

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung Visi dan Misi daerah melalui Visi dan Misi yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial untuk semua dan tenaga kerja serta masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dan profesional

Misi

1. Mencegah, mengendalikan, mengatasi dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan kepedulian dalam menangani penyaluran korban bencana alam/sosial
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja
4. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta pelaksanaan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dalam menjamin perlindungan tenaga kerja
5. Meningkatkan pelayanan transmigrasi bagi masyarakat yang secara sukarela menjadi transmigran untuk menetap dan mendapatkan peluang terpenuhinya kesejahteraan diri dan keluarga
6. Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan administratif dinas

B. Strategi dan Arah Kebijakan Dinsosnakertrans.

Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan keluarga miskin serta meningkatkan penanganan terhadap terjadinya bencana alam/sosial
- b. Mengoptimalkan sumber daya Dinas dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinsosnakertrans
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

- d. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
- e. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis (Industrial Harmony and Economi Development) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

C. Prioritas Dinsosnakertrans

1. Program Penanganan Penyandang masalah dan Kesejahteraan Sosial
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Tenaga Kerja
5. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
6. Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigrasi

Sedangkan untuk Program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Metrik Restra terlampir)

BAB III

KABIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Tidak Ada

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi Belanja Daerah Dinsosnakertrans pada tahun 2012 mendapatkan Alokasi Dana APBD sebesar Rp 3.573.365.000,- dana tersebut di peruntukan =

a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.802.230.000,- realisasi Rp. 2.711.061.727,-

b. Belanja Langsung Rp 1.087.022.000,- realisasi Rp. 1.028.074.276,-

2. Permasalahan

Belum optimalnya dalam pemanfaatan dana dalam menyusun perencanaan dalam DPA, sehingga masih terjadi sisa dana.

Solusi

Pada tahun yang akan datang akan lebih dicermati dalam menyusun anggaran yang dituangkan di DPA

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB

1. Tingkat pencapaian Standart Pelayanan Minimal secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Keluarga :

1. **Pembinaan Anak Terlantar di Luar Panti dan petirahan Anak**, telah dibina 56 anak di Kec. Karangjambu dan Kec. Bukateja. Alokasi dana Rp, 22.597.000,- Realisasi Rp.22.434.000,- (99, 28 %).
2. **Pembinaan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan AKM (Asistensi Keluarga Miskin)** Memberi ketrampilan terhadap 10 WRSE dan 10 AKM di Desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Alokasi dana Rp. 32.310.000,- Realisasi Rp. 31.239.000,- (96,69 %).
3. **Fasilitasi Program KSBM (Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)** mengharmoniskan warga, dan gotong royong serta membangun keserasian sebanyak 1406 KK di Kec. Karangjambu, Kaligondang dan Kemangkon. Alokasi dana Rp. 10.000.000,- Realisasi Rp. 8.737.000,- (87, 37 %)
4. **Pendataan dan Penanganan PMKS** telah dilaksanakan pemulangan orang terlantar, pengiriman PMKS 172 orang. Alokasi dana Rp. 34.634.000,- Realisasi Rp. 29.190.000,- (84,28 %).
5. **Bimbingan Sosial dan Ketrampilan ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika), PGOT(Pengemis Gelandangan Orang Terlantar), Anak Jalanan dan Ex. Narapidana** di Kec. Pengadegan. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan perbengkelan terhadap 10 orang. Alokasi dana Rp. 12.491.000,- Realisasi Rp. 4.291.000,- (34.35 %) Bantuan UEP berupa peralatan bengkel (kompresor) belum dapat dicairkan karena ada kesalahan rekening.
6. **Pelayanan dan Rehabilitasi penyandang Cacat**, Terlayannya penca dalam mendapatkan UEP sebanyak 38 orang mendapatkan alat bantu. Alokasi dana Rp. 89.944.000,- Realisasi Rp. 89.944.000,- (100 %).
7. **Porseni Penyandang Cacat**, Menyalurkan bakat dan krealitas Penyandang cacat 25 orang dengan Alokasi dana Rp. 15.260.000,-

Realisasi Rp. 12.609.000,- (82 %). Perjalanan Dinas Luar Daerah/bantuan transport peserta dan pendamping tidak dapat diambil karena porseni dilaksanakan di dalam daerah.

8. **Bulan Bhakti Karang Taruna.** Meningkatkan rasa pengabdian dan nasionalisme generasi muda sebanyak 130 orang di desa Krenceng Kejobong. dan membantu bibit tanaman keras (Mahoni) 300 batang, Alokasi dana Rp. 9.818.000,- Realisasi Rp. 9.818.000,- (100 %).
9. **Fasilitasi Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Orang dengan Kecacatan Berat.** Tercapainya kemampuan dan memelihara taraf kesejahteraan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati tarap hidup yg wajarr, Aloaksi dana Rp 9.000.000,- Realisasi Rp 6.790.000, (75,44 %).

b. Program Penanggulangan Bencana Alam / Sosial

Menyalurkan bantuan korban bencana alam/Sosial. .Alokasi dana Rp. 14.759.000,- Realisasi Rp. 12.354.000,- (83,70 %)

c. Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Tenaga Kerja :

1. **Pameran Bursa Kerja** mengundang 20 Perusahaan alokasi Dana Rp. 18.750.000,- Realisasi Rp 18.622.000,- (99,54 %) :
2. **Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD** terfasilitasi 200 orang alokasi dana Rp. 19.355.000,- Realisasi Rp. 18.381.250,- (94,97 %), sisa dana perjalanan luar daerah tidak dilaksanakan untuk efisiensi.
3. **Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN**, Sasaran 25 orang dengan alokasi dana Rp. 9.312.000,- Realisasi 25 orang tenaga kerja / 100 %, Rp. 8.935.700,- (95,96 %) Sisa dana untuk efisiensi.
4. **Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja** dapat dilatih 20 Orang ketrampilan otomotif. Alokasi dana Rp. 48.733.000,- Realisasi Rp. 44.315.000,- (90,93 %). Kelebihan anggaran transport.
5. **Pengadaan sarpras BLK** telah dilaksanakan dengan rincian hasil sebagai berikut : Kursi Belajar 40 buah, Mesin Ketik Manual 2 unit, Alokasi dana Rp. 38.900.000,- Realisasi Rp. 38.900.000,- (100 %).
6. **Peningkatan Produktifitas dan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik (DBH-CHT)** dengan sasaran 250 pekerja / 1 perusahaan. Alokasi Dana Rp 63.012.000,- Realisasi Rp 62.970.000,- (99,93 %)
7. **Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**, dilaksanakan Survey ke 3 pasar Alokasi dana Rp.,. 14.533.000,-

Realisasi Rp. 13.890.950,- (95,58 %). Honor kegiatan tidak diambil karena personil pindah kerja dan sakit.

8. **Pemberdayaan K-3** dengan sasaran 10 perusahaan / 100 pekerja, dapat dilaksanakan Upacara yang dihadiri 250 orang dan menghimbau kepada tiap perusahaan untuk memasang spanduk yang berkaitan dengan Bulan K3 alokasi dana Rp. 6.948.000,- Realisasinya Rp. 6.608.000,- (95,11%)
9. **Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial.** Alokasi Dana 13.626.000,- Realisasi Rp 13.609.000,- (99,89 %) Hasil : diperolehnya data pelaksanaan pembayaran UMK tahun 2012, tersosialisasinya UMK tahun 2013 (100 perusahaan) dan tersampainya informasi Pedoman Peraturan Ketenagakerjaan.
10. **Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja (DBH-CHT).** Sasaran 60 orang pekerja di lingkungan pabrik rokok, Alokasi dana Rp 51.682.000,-. Realisasi Rp 40.462.000,-.(78,29 %) Kelebihan anggaran biaya cetak dan karena perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan karena kurang 10 K.
11. **Revitalisasi Wajib Laport Ketenagakerjaan di perusahaan.** Hasil tersedianya Data Ketenagakerjaan./ 14 perusahaan. Alokasi dana Rp 7.322.000,- Realisasi Rp 7.312.000,- (99.86 %)
12. **Sertifikasi Ahli K3.** Penyelenggaraan pelatihan kepada 30 pekerja / 1 perusahaan untuk memperoleh Ahli K3 yang bersertifikat. Alokasi dana Rp 25.000.000,-. Realisasi Rp 22.715.000,- (90.86 %)

d. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

1. **Penyediaan bahan jasa perkantoran,** melayani 54 PNS yang ada di Dinsosnakertrans Alokasi dana Rp. 114.345.000,- Realisasi Rp 107.179.951,- (93,73 %) Sisa dana yang tidak digunakan adalah kelebihan penyediaan dana rekening listrik dan air.
2. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi,** melayani 54 PNS yang ada di Dinsosnakertrans.lokasi Rp. 110.000.000,- Realisasi Rp. 108.817.950,- (98,93 %).
3. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,** dapat memelihara kendaraan roda empat 5 unit, komputer 18 unit, printer 13 buah, AC 4 unit dan Gedung 1 lokasi . Alokasi dana Rp. 142.379.000,- Realisasi Rp. 137.672.025,- (96,69 %). Kelebihan anggaran BBM dan Anggaran Perpanjangan STNK.
4. **Pemeliharaan TMP,** telah dilaksanakan pengecatan dan kebersihan TMP. Alokasi dana Rp. 18.603.000,- Realisasi Rp. 18.287.000,- (98,30 %).

5. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**, dapat memenuhi peralatan kantor antara lain, 1 buah Almari, 1 unit Notebook. Alokasi dana Rp. 14.450.000,- Realisasi Rp. 14.450.000,- (100 %).
6. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**, dapat menyertakan 10 PNS untuk diklat, Alokasi dana Rp. 8.000.000,- Realisasi Rp. 7.201.500,- (90,02 %).
7. **Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RENSTRA dan LK-SKPD.** Alokasi Dana Rp 4.010.000,- Realisasi Rp 3.930.500,- (98,02 %)

PERMASALAHAN.

- o Belum optimalnya dalam perencanaan sehingga masih ada kegiatan yang tidak mendukung SPM
- o Belum Optimalnya penggunaan anggaran yang didapat sehingga terjadi sisa pagu. Hal ini juga kurang cermatnya dalam menyusun perencanaan di DPA

SOLUSI

Mengoptimalkan dalam perencanaan penyusunan DPA, dan Mengarahkan kegiatan yang mendukung SPM di masa datang.

B Urusan Pilihan yang dilaksanakan

1. Tingkat pencapaian Standart Minimal ;

Dinsosnakertrans memiliki satu program kegiatan Ketransmigrasian yakni Program Penyiapan dan fasilitasi Transmigrasi, pada Program ini belum termasuk di dalam Standart pelayanan Minimal (SPM) namun Terakomodir di Indeks Kinerja Kunci (IKK).

2. Realisasi Program dan Kegiatan

Program penyiapan dan fasilitasi Transmigrasi ada 2 kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi Transmigrasi dilaksanakan terhadap 29 KK : 10 KK ke UPT Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, 10 KK ke UPT Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dan 9 KK ke UPT Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah, Alokasi dana Rp. 107.249.000,- Realisasi Rp. 106.367.000,- (99,18 %).
- b. Sosialisasi Ketransmigrasian, telah dilaksanakan Sosialisasi di 20 Desa Potensi Transmigrasi., Alokasi dana Rp. 8.724.000,- Realisasi Rp.8.719.000,- (99,94 %)

3. Permasalahan.

Target dari pusat sangat sedikit, sedangkan peminat banyak.

Solusi

Diadakan seleksi sehingga Calon Transmigran benar-benar diuji kemantapannya untuk menjadi Transmigrasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Dinsosnakertrans

1. Dasar Hukum.
 - a. Setditjend Bina Penta Nomor : 025/025-04.4/01/13/2011 tanggal 09 Desember 2011, tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - b. SK Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Nomor Kep. 71/Men/SJ/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
3. SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinsosnakertrans.
4. Program dan Kegiatan yang di terima dari pelaksanaanya.
Program : Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja TA 2012
Kegiatan : Infrastruktur jalan desa dan ekonomi masyarakat.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran APBN Rp 651.000.000,-
6. - Permasalahan
Koordinasi belum optimal dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- Solusi
Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi baik ke pusat maupun ke lokasi kegiatan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Program Ketransmigrasian dengan kegiatan fasilitasi Transmigrasi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

- a. Daerah yang diajak kerjasama
 - Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
 - Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Dasar Hukum
 - PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)
 - Permendagri nomor 22 Tahun 2009 tentang Tehnis Tata Cara Kerjasama
- c. Bidang Kerjasama, Ketransmigrasian
- d. Nama Kegiatan, Fasilitasi Transmigrasi
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran APBD Kabupaten Rp. 99.475.000,-
- f. Jangka waktu kerjasama 1 tahun
- g. Hasil/Output dan kerjasama memfasilitasi 30 KK
- h. Hal lain dapat dilaporkansebagai berikut :
 - h.1. Dinsosnakertrans mendapatkan dana dekonsentrasi sejumlah Rp. 185.280.000,- , dirinci 2 kegiatan :
 - h.2. Realisasi Kegiatan
 - a. Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2012. Alokasi dana Rp. 147.380.000,- realisasi Rp. 146.745.000,- (99 %)
 - b. Hubungan Industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2012 Alokasi dana Rp. 37.900.000,- Realisasi Rp. 37.900.000,- (100 %)
 - h.3. Dasar Hukum.
 - DIPA nomor : 0230/026-08.3.01/13/2011 tanggal 20 Desember 2010 tentang Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2011.

- DIPA nomor : 023010/026-05.3.1/13/2011 tanggal 20 Desember 2010 tentang Program Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga

Tidak ada

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Tidak ada

D. Pencegahan dan penanggulangan Bencana

- a. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya. Banjir, angin besar, rumah roboh, tanah longsor Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena Bencana Alam/Sosial.
- b. Status bencana lokal Kabupaten
- c. Sumber dan Jumlah anggaran APBD Kabupaten Rp. 14.909.000,-
- d. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana
 - Meningkatkan Kewaspadaan
- e. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana
(tidak ada)
- f. Potensi Bencana
 1. Banjir
 2. Angin Ribut/Putting beliung
 3. Tanah longsor

F. Pengelolaan kawasan khusus

Tidak ada

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrriban Umum

Tidak ada

3. Permasalahan

Target dari pusat sedikit.

Solusi

Mengusulkan tambahan target

BAB VII
P E N U T U P

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 ini kami buat untuk dapat dijadikan pedoman atau referensi di dalam laporan kegiatan Pertanggungjawaban Bupati dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Purbalingga 23 Januari 2013

KEPALA DINAS
SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURBALINGGA

NGUDIARTO. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590811 198503 1 016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA / SKPD)
2. Dokumen Aset
3. Lain-lain yang [diperlukan.](#)



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Jl. Letjend. S. Parman Nomor : 17 Telp. (0281)891187 Fax (0281) 894861
PURBALINGGA - 53316

